

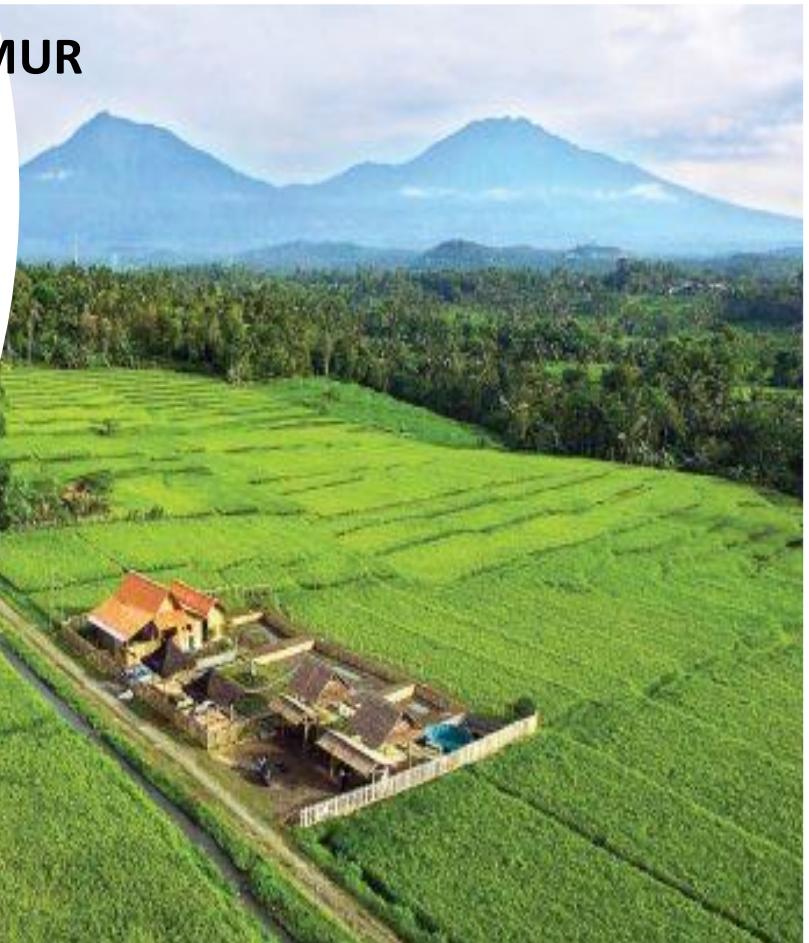


LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025 sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan IV Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025- 2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan



Drs. RAPIUDDIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196601211986021002

DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Aspek Strategi Organisasi	10
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	10
1.5 Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Target Kinerja Tahun 2025-2029	13
2.1.1 Visi dan Misi	13
2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran	15
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Analis Capaian Kinerja	25
BAB IV PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	6
Tabel 2	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025	7
Tabel 3	Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025	8
Tabel 4	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	14
Tabel 5	Keselarasan Misi, Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	16
Tabel 6	Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target Kinerja Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	17
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	18
Tabel 8	Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	19
Tabel 9	Penjelasan atas Sasaran,Indikator Sasaran dan Target yang ditetapkan	19
Tabel 10	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	24
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kerja Tahun 2025	24
Tabel 12	Capaian Kinerja Sasaran Stategis 1 Trwiwulan IV Tahun 2025	25
Tabel 13	Perbandingan Renstra Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri pada Tahun 2025	26
Tabel 14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah pada Status Desa Indeks Desa Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur.....	26
Tabel 15	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan	27
Tabel 16	Perbandingan Perkembangan Status Indeks Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2025	28

Tabel 17	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029).....	29
Tabel 18	Capaian Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025 (dibandingkan Capaian Secara Nasional/Provinsi/Kabupaten).....	30
Tabel 19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	34
Tabel 20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
Tabel 21	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025.....	45
Tabel 22	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II.....	48
Tabel 23	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Nilai Sakip DPMD Triwulan IV Tahun 2025.....	49
Tabel 24	Komponen Penilaian Kinerja Terhadap LKj DPMD	49
Tabel 25	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun - Tahun Sebelumnya.....	50
Tabel 26	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Terhadap Jangka Menengah (2021- 2025).....	51
Tabel 27	Perbandingan Nilai SAKIP DPMD Pronvinsi Sulawesi Selatan dengan DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	52
Tabel 28	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	54
Tabel 29	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel 30	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	56
Tabel 31	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	62
Tabel 32	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	63
Tabel 33	Permasalahan dan Solusi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2024 -2025 28

BAB 1**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah dalam perubahan paradigma pembangunan desa, dimana Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan dapat menentukan arah pembangunan di desa sesuai karakteristik masing-masing desa. Pembangunan desa telah mengalami kemajuan yang signifikan, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan serta peningkatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan status Desa di Indonesia, dimana pada tahun 2024 sebanyak 17.203 desa mandiri, 23.063 desa maju, 24.532 desa berkembang dan untuk jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dimana hanya tinggal 6.100 desa tertinggal dan 4.363 desa sangat tertinggal. (*sumber data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Maret 2025*).

Namun sampai dengan tahun 2024 masih terdapat dua indeks capaian pembangunan desa, yaitu Indeks Desa dan Indeks Desa Membangun. Pada tahun 2023, Bappenas bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK menginisiasi Revitalisasi Indeks Desa untuk meninjau indikator, sumber data hingga metode perhitungan Indeks Tunggal yang mengukur capaian pembangunan desa. Indeks Desa diharapkan menjadi salah satu batu loncatan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasi dan meminimalisir redundansi data. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa sebagai salah satu ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan atau pembangunan Desa di Indonesia.

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir triwulan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Target Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan funsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat dengan 2 sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam

lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.
3. **Tugas Bidang Penataan Desa** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penataan desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. **Tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan SDM dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pemerintah desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SDA desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. **Tugas Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang badan permusyawaratan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 37 orang, yang terdiri atas 16 PNS, 5 CPNS, 13 PPPK, 1 PPPK Paruh Waktu dan 2 Upah Jasa (Cleaning Service dan Penjaga Kantor).

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
(1)	(2)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV	2	1	1		-	-	-		-	-	-		-	1
2	III	1	2	6		3	-	-		-	-	-		-	5
3	II	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
4	CPNS	-	-	1	4	-	-	-		-	-	-		1	4
5	PPPK	-	-	-	8	-	-	1	4	-	-	-		1	12
6	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-		-	-
7	Upah Jasa	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		1	1
Jumlah		3	3	8	15	-	-	1	5	2	-	-	-	14	23

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaiuan, Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 37 orang pegawai yang terdiri atas 16 PNS, 5 CPNS, 13 PPPK, 1 PPPK Paruh Waktu dan 2 Upah Jasa. Dari 37 orang pegawai, terdapat 6 orang yang berpendidikan S3/S2, 23 orang berpendidikan S1/D IV, , 6 orang berpendidikan SLTA/Sederajat dan 2 orang berpendidikan SMP/Sederajat.

Tabel 2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat		L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
5	IV.a	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	2	1	1									5	2

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Desember 2025

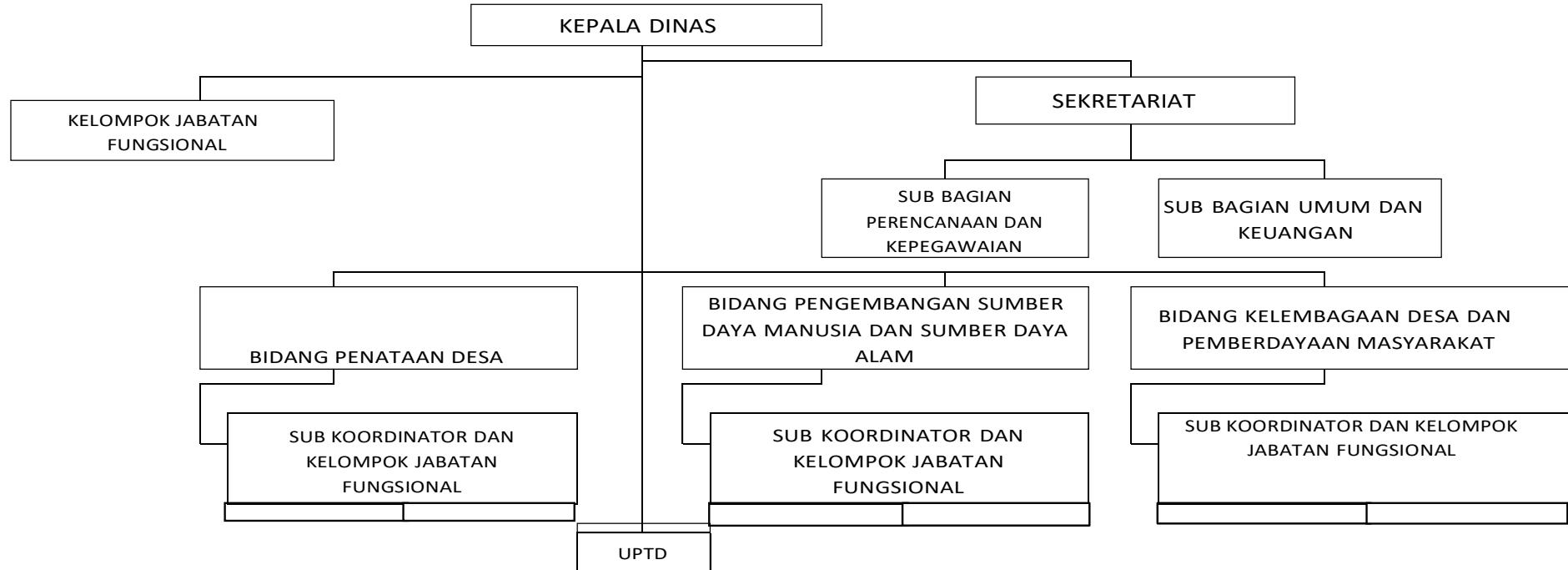
Berdasarkan tabel 1.2 diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 7 (tujuh) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.b , 1 (satu) orang pejabat Eselon III.a , 2 (dua) orang pejabat Eselon III.b , dan 2 (dua) orang pejabat Eselon IV.a

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 5 (lima) orang pejabat fungsional yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan rincian terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3																
Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin																
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025																
No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SLTA/Sederajat	SMP/Sederajat	SD / Sederajat									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
	Jumlah	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Desember 2025

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERTAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



1.3 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan pembinaan kepada 125 desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)”***. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.

2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
4. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
5. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
6. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masih belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Target Kinerja 2025-2029.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2025– 2029. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun rencana strategis tahun 2025-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi**1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapain Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Maju”, dan “Sejahtera”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perwujudan Visi RPJMD Kab Luwu Timur Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”	“Maju”	Kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	“Sejahtera”	Kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1).
- Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (M2).

- c. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3).
- d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi (M4).
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi Ke-3 RPJMD : Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan

Misi Ke-5 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabarab dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 mengacu pada Misi ke 3 dan Misi ke 5, yaitu:

Tabel 5
Keselarasan Misi, Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan (M3)	Meningkatnya Perkembangan Desa Sebagai Pusat Pelayanan Dan Pertumbuhan Ekonomi (T4)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa (S1)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.
 Sasaran : Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa
 Indikator : Persentase Status Desa Mandiri.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan target Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang

diemban oleh DPMD Kab. Luwu Timur. Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Tingkat Kemandirian Desa	29,60%	31,00%	33,00%	35,50%	38,00%	40,50%	43,00%	
	Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa (S1)	Percentase Status Desa Mandiri	29,60%	32,00 %	34,40 %	36,80%	39,20%	41,60%	44,00%	
		Percentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa	NA	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
		Percentase Peningkatan Kelembagaan Desa	NA	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
		Percentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	NA	0,16	10,40	19,20	28,00	36,80	46,00	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (S2)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	63,00	65,00	70,00	71,00	71,05	71,20	72	

2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja serta anggaran.

Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu :

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	30,00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan nomor DPPA/A.3/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 mengelola dana sebesar Rp. Rp. **5.855.206.239,00** terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. **4.762.063.479,00** dan Belanja Modal Rp. **1.093.142.760**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Program dan Pagu Perubahan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.550.657.024	APBD-P
2.	Program Penataan Desa	36.541.050	APBD-P
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	505.233.176	APBD-P
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	762.759.990	APBD-P
	JUMLAH	5.855.206.239	

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Tabel 9
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya status desa di Kabupaten Luwu Timur merupakan indikator kinerja utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur melalui peningkatan nilai Indeks Desa (ID) dari kondisi baseline menuju target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Peningkatan status desa menunjukkan perbaikan berkelanjutan pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pelayanan dasar, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.. Perkembangan lembaga perekonomian desa, khususnya BUM Desa dan

		<p>kelembagaan ekonomi desa lainnya, menjadi faktor penopang pencapaian target peningkatan status desa. Indikator ini diukur melalui peningkatan jumlah dan kinerja lembaga ekonomi desa yang aktif dan produktif, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja di desa. Perkembangan tersebut secara langsung memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mendorong percepatan pencapaian desa maju dan desa mandiri sesuai target kinerja daerah.</p>
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Persentase status desa mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik
NO.	TARGET	PENJELASAN
1	30,00	<ul style="list-style-type: none"> Target Persentase meningkatnya desa mandiri diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2024 capaian Persentase meningkatnya desa mandiri 29,60% atau 37 desa mengalami peningkatan status mandiri dan tahun 2025 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa untuk mencapai status desa mandiri. Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2025 di targetkan 30,00% atau kurang lebih 38 desa yang akan ditingkatkan status mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.
NO	SASARAN	PENJELASAN
2.	Meningkatnya	Sakip adalah rangkaian sistematik dari berbagai

	akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	72	Target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 72 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten, maka pada tahun 2025 DPMD meningkatkan target capaian.

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengembang amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang

diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 11
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa	Percentase status desa mandiri	30,00	30.40	101.33%	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1*)	72	71,05	98.68%	Sangat Memuaskan

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA STATUS DESA DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Status Desa Mandiri, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan I Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Meningkatnya Desa Mandiri	Persen	30,00%	30.40%	101.33%

☞ PERSENTASE STATUS DESA MANDIRI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Status Desa Mandiri Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian Presentase Status Desa Mandiri
Pada Triwulan IVI Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan IV Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Status Desa Mandiri	Persen	30,00%	30.40%	101.33%
Rata-rata Capaian Kinerja			101.33%		

Indikator sasaran DPMD Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase Status Desa Mandiri dengan target tahun 2025 adalah 30,00% dan **realisasi sebesar 30.40% atau 1 desa meningkat status mandiri** yaitu **Desa Arolipu Kecamatan Wotu** dengan persentase capaian kinerja 101.33%. Sehingga sampai dengan triwulan IV Desa Mandiri sebanyak 38 Desa.

Tabel 14

REKAP STATUS DESA KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	TOTAL	JUMLAH DESA						
			SUDAH SUBMIT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	ANGKONA	10	10	5	5	0	0	0	0
2	BURAU	18	18	2	7	9	0	0	0
3	KALAENA	7	7	2	3	2	0	0	0
4	MALILI	14	14	7	7	0	0	0	0
5	MANGKUTANA	11	11	2	8	1	0	0	0
6	NUHA	4	4	2	0	2	0	0	0
7	TOMONI	12	12	5	7	0	0	0	0
8	TOMONI TIMUR	8	8	2	6	0	0	0	0
9	TOWUTI	18	18	5	8	5	0	0	0
10	WASUPONDA	6	6	3	3	0	0	0	0
11	WOTU	17	17	3	5	9	0	0	0
TOTAL		125	125	38	59	28	0	0	0

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021 -2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2021 – 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa						Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Triwulan IV Tahun	Target	Realisasi	Capaian	13,71%
	Persen	2021	5.65	4,07	72.03	
Presentase Status Desa Mandiri		2022	7.26	4,84	66.66%	
		2023	8.87	12,00	135.28%	
		2024	20.08	22,40	111.55%	
		2025	30,00	30.40%	101.33%	

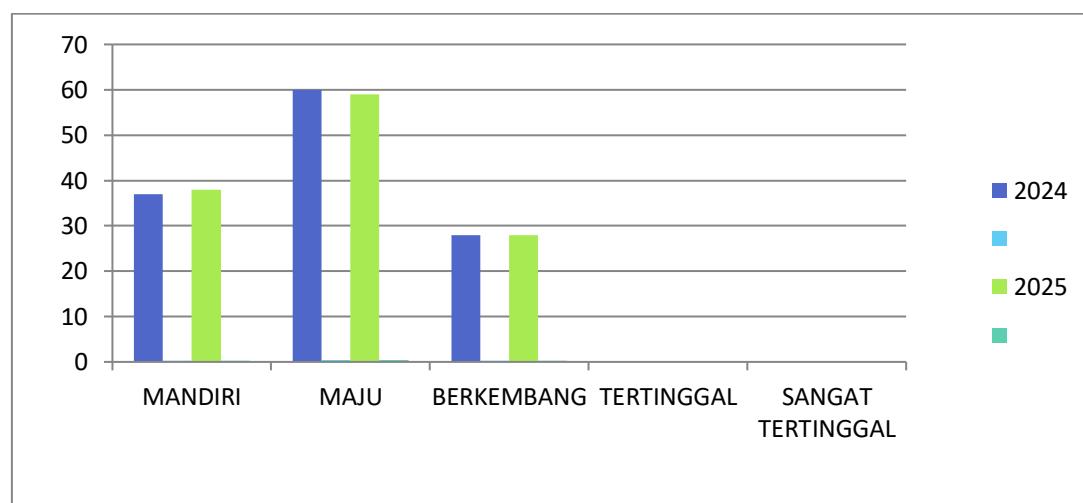
Pengukuran kinerja dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan peningkatan kinerja progresif yang terlihat sejak tahun 2021, dengan lompatan signifikan pada tahun 2023 dan konsistensi keberhasilan di tahun 2024. Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, dapat dilihat pada tabel diatas.

Perbandingan kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

- Pada triwulan IV tahun 2021 masih awal transisi, jumlah status desa mandiri dengan realisasi $\pm 4,07\%$ atau ± 5 desa mandiri capaian 72.03%;
- Pada triwulan IV tahun 2022 peningkatan masih terbatas dengan presentase 4,48% atau 6 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 66.66%;
- Pada triwulan IV Tahun 2023 lonjakan peningkatan mulai terlihat yaitu dari target 8.06% atau 10 desa mandiri menjadi 12.00% atau 15 desa mandiri;

- pada triwulan IV Tahun 2024 terjadi pertumbuhan signifikan berkelanjutan dari target 20.08% atau 26 desa yang akan ditingkatkan status mandiri, diperoleh realisasi sebesar 22,40% atau 28 desa mengalami peningkatan status desa mandiri; dan
- Pada triwulan IV tahun 2025 Presentase Status Desa Mandiri sampai bulan Desember 2025 sekitar sebesar 30.40%, atau 1 desa mengalami peningkatan status desa mandiri yaitu Desa Arolipu Kecamatan Wotu sehingga pada triwulan ini total Desa Mandiri 38 Desa Mandiri.

Grafik1. Perkembangan Status Indeks Desa Kabupaten Tahun 2024-2025



Tabel 16. Perbandingan Perkembangan Status Indeks Desa Kabupaten Tahun 2024-2025

	2024		2025	
	Desa	Persentase	Desa	Persentase
MANDIRI	37	29,60%	38	30,40%
MAJU	60	48,00%	59	47,20%
BERKEMBANG	28	22,40%	28	22,40%
TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sampai dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, walaupun berhasil namun masih belum melampaui target rentnya 2025-2029 sebesar 30%. Dengan sinergi program yang terus dijalankan, target jangka menengah sangat mungkin dicapai sebelum akhir tahun, dengan proses input dan validasi indeks desa tetap berjalan dengan baik.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada triwulan IV tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)

Sasaran I	Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		
	Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025		
Presentase Status Desa Mandiri	30,00	30,40	40,50%	75,06%

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Analisis perbandingan capaian indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 18
Capaian Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten)

Wilayah	Persentase Desa Mandiri	Keterangan
Target Nasional	±23%	<p>Target RPJMN 2020–2024 yaitu 6.000 desa Mandiri. Capaian Kabupaten Luwu Timur 30% telah melampaui target nasional 23%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan strategi jauh lebih progresif dibanding rata-rata secara nasional yaitu nilai Tengah atau rata-rata dari seluruh data yang dikumpulkan dari seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks Indeks Desa (ID) atau persentase desa mandiri, rata-rata nasional menunjukkan rata-rata capaian seluruh desa di Indonesia yang telah mencapai status "Mandiri", dibandingkan dengan total seluruh desa yang ada di Indonesia.</p> <p>Indonesia memiliki 74.000 desa, dan 17.000 diantaranya telah berstatus Mandiri, maka :</p> <p>Rata-rata nasional desa Mandiri = $(17.000 / 74.000) \times 100\% = \pm 23\%$</p> <p>Jadi, kalau Luwu Timur capaiannya 30%, dan rata-rata nasional hanya 23%, artinya Luwu Timur berada di atas rata-rata capaian nasional.</p>
Provinsi Sulawesi Selatan	±22–25%	Mencatat tren kenaikan

		persentase desa mandiri pada kisaran 22-25%.Rata-rata meningkat tiap tahun, puncak di 2025
Kabupaten Luwu Timur	±30%	Melebihi target provinsi dan nasional
Kabupaten Bone	±18%	Masih fokus pada penguatan desa berkembang dan maju
Kabupaten Gowa	±22%	Pada triwulan IV tahun 2025 pertumbuhan stabil, banyak desa maju belum naik Mandiri
Kabupaten Wajo	±25%	Termasuk kabupaten dengan tren kenaikan stabil

Angka kabupaten/kota lain disesuaikan berdasarkan tren publikasi indeks desa Kemendesa.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

✓ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran

- Adanya komitmen kuat dari kepala desa dan dukungan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa menjadi faktor utama peningkatan status desa menuju mandiri.
- Musrenbangdes berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat, BPD, dan lembaga desa sehingga program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan riil desa.
- Penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan indikator Indeks Desa, khususnya pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Adanya pendamping desa, fasilitasi teknis, serta monitoring dan evaluasi yang rutin dari DPMD meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

- BUM Desa yang aktif dan produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Presentase Status Desa Mandiri, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi, yaitu :

- Masih terdapat aparatur desa yang belum memahami secara optimal pengelolaan keuangan desa, perencanaan berbasis data, dan pemanfaatan aplikasi pendukung.
- Sebagian kegiatan belum berorientasi pada peningkatan indikator ID, melainkan masih bersifat administratif atau tidak berkelanjutan.
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program desa.
- Akses infrastruktur, teknologi informasi, dan layanan dasar yang belum memadai menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
- Keterbatasan SDM pengelola, rendahnya inovasi usaha, serta minimnya analisis potensi desa menyebabkan BUM Desa tidak berkembang atau stagnan.

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Penguatan Kapasitas Aparatur Desa berupa pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa, perencanaan berbasis Indeks Desa, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Penajaman Perencanaan Berbasis Data Indeks Desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
- Pendampingan manajemen usaha dan penyusunan rencana bisnis BUM Desa.
- Mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan desa
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator IDM.

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam**

menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada triwulan IV Tahun 2025 seefektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Peningkatan status desa mandiri dan pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan hasil nyata. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian, perlu penguatan strategi monitoring dan dukungan teknis.

Adapun capaian kinerja triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :

- Sebanyak 1 desa naik status menjadi mandiri, berdasarkan hasil pemuktahiran data Indeks Desa yaitu Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- Kenaikan status ini merupakan hasil dari peningkatan skor Indeks Desa melalui indikator ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang didukung program-program pemberdayaan serta digitalisasi data desa.
- 80% desa telah menginput dan memutakhirkan data Indeks Desa secara mandiri.
- 60% BUMDes aktif melaporkan perkembangan usaha.

Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dinilai tinggi ditandai dengan :

- Respon positif dari desa terhadap program DPMD
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa
- Kegiatan pendampingan tepat waktu

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

✓ Efisiensi Anggaran

- Pendampingan Desa yang intensif dilakukan melalui tenaga pendamping profesional dan fasilitator lokal, yaitu Sosialisasi Indeks Desa dan pendampingan penginputan Indeks Desa dengan tujuan mempercepat pemuktahiran data dan verifikasi status desa.
- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
- Musyawarah desa dan Forum Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat

dalam pembangunan dan perencanaan desa serta memberikan nilai tambah pada aspek ketahanan sosial dalam penilaian Indeks Desa.

✓ **Efisiensi Sumber Daya**

- Sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, namun DPMD dengan keterbatasan tersebut tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sumber daya manusia yang ada di DPMD sebanyak 35 orang ASN yang terdiri dari 15 orang PNS, 19 orang PPPK, 1 orang PPPK Paruh Waktu. Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat dan desa tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, untuk itu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD memaksimalkan tenaga Pendamping Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana memaksimalkan peralatan yang ada pada OPD terkait maupun Pemerintah Desa.
- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa terfasilitasi dengan adanya papan bicara yang ditempatkan pada 125 desa se-Kabupaten Luwu Timur, sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi pembangunan desa. Selain itu penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kinerja				Anggaran			Rencana Tindak Lanjut
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya status desa dan lembaga perekonomian desa	Percentase status Desa Mandiri	30.00 %	30.40%	101.33 %	1.246.796.815	951.304.611	4.59%	Dengan mengacu pada pencapaian	

Program Penataan Desa	Percentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	85%	-	0,00%	26.602.050	17.544.500	65.95%	tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	85%	40.54%	47.69%	545.543.925	409.995.022	75.15%	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Percentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	80%	51.25%	64.06%	674.650.840	523.765089	77.63%	

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa	Percentase Status Desa Mandiri	101.33%	23.70%	23.39

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa sebesar 101.33% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 23.70%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 23.39%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - (\underline{\text{Realisasi Biaya}} \times 100\%)$$

Target Biaya

$$= 100\% - (\underline{951.304.611} \times 100\%)$$

$$1.246.796.815$$

$$= 100\% - 76.30$$

$$= \mathbf{23.70\%}$$

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Program Penataan Desa

Formulasi Program Penataan Desa : Jumlah desa yang mengalami peningkatan penataan dibagi target jumlah desa dikali 100%

Capaian target indikator yaitu persentase desa yang baik peningkatan penataan desa 20,08% atau 26 desa yang ditargetkan meningkat dan terealisasi sebesar 0,00% atau 0 desa yang meningkat penataan desa menjadi mandiri.

Dan direncanakan Pemekaran Desa namun tidak dapat dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mencabut Moratorium tentang Pemutakhiran Kode Wilayah Penataan Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang intinya tidak boleh ada pemekaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 karena bisa berpengaruh terhadap daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi:

1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Formulasi Program Administrasi Pemerintahan Desa : Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dibagi target desa dikali 100%.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

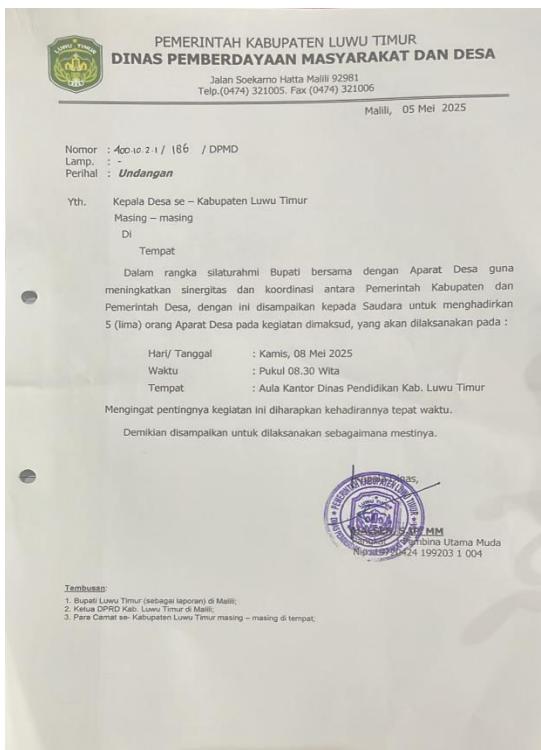
- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada triwulan I telah dilaksanakan rapat koordinasi Pemerintah daerah bersama Kapolres Luwu Timur dengan Pemerintah Desa tentang Sinkronisasi program ketahanan Pangan Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Dengan peserta adalah Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur.

- Gambar.
1. Kegiatan Rakor Pemerintah Kabupaten Bersama Kapolres Luwu Timur Dan Pemerintah Desa



pada triwulan III telah dilaksanakan rapat koordinasi Bupati Luwu Timur dengan Pemerintah Desa, peserta adalah masing-masing desa menghadirkan 3 Aparat Desa se-Kabupaten Luwu Timur. Sehingga capaian sub kegiatan ini 100%.



2. Kegiatan Rakor Bupati Luwu Timur dengan Pemerintah Desa

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun dan disosialisasikan adalah 5 Perbup dan Perda. Kegiatan ini memuat pelaksanaan proses penyusunan produk hukum hingga penetapannya. Realisasi 5 produk hukum desa, dan Capaian 100%

Pada triwulan ini dilaksanakan draft penyusunan ranperda, yaitu :

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pembangunan Desa Unggul Juara
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian Dan Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 5. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 235/D-02/VII/Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKP Desa, yang pelaksanannya pada triwulan III pada Bulan Juli - September 2025. Target Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebanyak 125 desa, tujuan pendampingan yaitu sebagai penguatan agar terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dan Realisasi 125% sehingga capaian 100%



Gambar.
Kegiatan Asistensi RKP Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

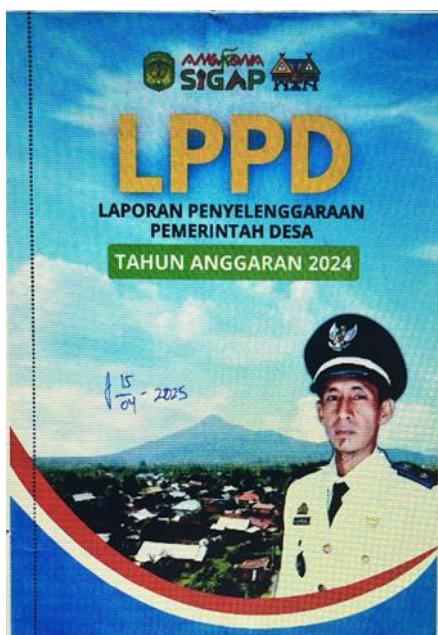
125 desa yang menyusun APBDesa Perubahan TA. 2025, Realisasi 100%



Gambar.
Kegiatan Asistensi APBDes Perubahan 2025

- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, namun LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD sehingga kegiatan sub ini dilaksanakan pada triwulan III. target pada triwulan 3 adalah 125 dokumen, dan realisasi 125 dokumen capaian kinerja 100%



Gambar : Dokumen LPPD Desa

- Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 25 laporan.
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 sebanyak 25 desa di Kabupaten Luwu Timur ditunda pelaksanaannya dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut diatur perubahan atau perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, dengan begitu Kepala Desa yang semula jabatannya 6 tahun ditambah menjadi 8 tahun.
Sehingga anggaran kegiatan ini di Rasionalisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan target 15 Laporan, Pada triwulan IV terealisasi 15 Laporan pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Capaian kinerja sebesar 100%. kegiatan ini sifatnya disiapkan sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong dikarenakan perangkat desa mengundurkan diri, meninggal dunia dll, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut.
Adapun desa yang difasilitasi seleksi perangkat desa yaitu 1. Desa Mahalona, 2. Desa Balambano, 3. Desa Alam Buana, 4. Desa Watangpanua, 5. Desa Teromu, 6. Desa Lanosi, 7. Desa Pekaloa, 8. Desa Balirejo, 9. Desa Cendana Hitam 10. Desa Pekaloa, 11. Desa Loeha, 12. Desa Pattengko, 13. Desa Puncak Indah, 14. Desa Desa Manunggal, 15. Desa Jalajja





Gambar.
Kegiatan Fasilitasi test Pengangkatan
aparat desa

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun. Pada sub kegiatan ini selain menyusun profil desa juga dilaksanakan lomba desa tahun 2025 namun belum ada pemberitahuan juknis dari DPMD Provinsi Sulwesi Selatan. Target 1 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0,00%

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang. Pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu bimtek dan rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa, namun pada tahun 2025 kegiatan ini fokus pada Rapat Koordinasi anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah. Capaian pada triwulan IV yaitu 100%.

Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 33.515.033,- atau 97.22%

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program ini yaitu : Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desanya. Dengan **Formulasi Jumlah jumlah lembaga ekonomi yang sehat dibagi jumlah jumlah lembaga ekonomi dikali 100%**.

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada

pembangunan di desa. BUMDes memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2025 di Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 51.25%. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level cukup.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani, pada triwulan I telah dilaksanakan draft SK Kader Kelurahan. Capaian pada Triwulan IV yaitu 100%. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 147.103.120,- atau 99.68%
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan. Target pada triwulan 1 yaitu 1 dokumen, realisasi 1 dokumen

dengan capaian kinerja 100,00%. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 57.072.720,- atau 95.91%

Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 20.935.385,- atau 35.01%

- Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Indikator ouput sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 Laporan. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun sampai triwulan 4 belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 kelompok dengan capaian kinerja 0,00%. anggaran perdin ini direncanakan pada kegiatan TTG Tingkat Nasional di Celegon, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tertunda.

Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 20.935.385,- atau 35.01%

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Pada kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja, yaitu :
 - 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
 - 2) Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga
 - 3) Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP)

Target triwulan IV yaitu 4 dokumen, realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Disediakan anggaran kegiatan TW IV sebesar Rp. 495.885.300,- dan realisasi 438.743.497 atau 88.48%

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target triwulan IV 2025	Realisasi triwulan IV tahun 2025	Capaian (%)
I.	PROGRAM PENATAAN DESA	Terciptanya penataan desa	Persentase Peningkatan penataan desa	80%	0,00%	0,00%
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya penataan desa	Persentase terlaksananya Penataan Desa	75%	0,00%	0,00%
a.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	0 Desa	0,00%
II.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tersedianya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi desa	80%	77.78%	97.22%
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase Desa yang tertib administrasi dan	100%	77.78%	77.78%
a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dok	1 Dok	100%
b.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya produk hukum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dok	5 Dok	80%
c.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dok	125 Dok	100%
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersusunnya keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dok	125 Dok	100%
e.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksannya evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125 Dok	125 Dok	100%
f.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksannaya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Lap	0 Lap	0,00%
g.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 Lap	15 Lap	100%
h.	Fasilitasi Penyusunan Profil	Terlaksananya profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dok	0 Dok	0,00%

	Desa		yang tersusun			
i.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 org	124 org	0,00%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase lembaga desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa	75%	75%	100%
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100%	75%	75%
a.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya penata pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	1 Dok	0,00%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	1 Dok	100%
c.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksanya pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lap	0 Lap	0.00%
d.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dok	4 Dok	100%

8. Kesimpulan

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa" dengan Indikator Kinerja Persentase Status Desa Mandiri yaitu 80%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \underline{\text{Realisasi Persentase Status Desa Mandiri}} \times 100\%$$

Target Persentase Status Desa Mandiri

$$= \underline{30.40} \times 100\%$$

30.00

$$= \underline{\mathbf{101.33\%}}$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu Rp. **1.304.539.215,-** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **988.525.929,-** atau **75.78%**.

SASARAN STRATEGIS II (Sasaran Pendukung)**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II
Target Terhadap Realisasi
Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian
1	Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	71.25	70.75*	99.30%
Rata-rata Capaian Kinerja			140.35%		

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (n-1)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran II		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Triwulan IV Tahun 2025			
No	Indikator Kinerja	Satuan				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	71.25	70.75*	99.30%			

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah ‘**Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat**’.

Target Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 72 (BB), namun realisasi belum dapat diliris didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024 dengan Nomor 700.1.2.1/044/IX/II/TKAB Tanggal 07 Pebruari 2025 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 70.75 dengan kategori BB, realisasi tersebut dibawah target yang direncanakan.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 24
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Triwulan IV
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perencanaan Kinerja	30.00	23.10
	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10
	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80

Evaluasi Internal	Akuntabilitas Kinerja	25.00	16.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70.75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

2. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2021-2025)**

Capaian Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Triwulan IV Tahun 2021-2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan IV pada tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Target Tahun 2026
Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi Triwulan IV	Kategori	Capaian Kinerja	
Nilai AKIP	Nilai	2021	70.28	70.16	BB	99.83	73
		2022	70.35	73.35	BB	104	
		2023	71.00	68.90	BB	100.42	
		2024	71.25	70.75	BB	98.68	
		2025	72	70.75*	BB	98.68	

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan mempertahankan realisasi nilai direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD.
- Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran.

- d) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- e) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- i) Melakukan pemantaua mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 26
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Terhadap Jangka Menengah (2021 – 2025)

Sasaran II		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran		Realisasi			
		Tahun 2025	Realisasi sampai dengan tahun 2025		
Nilai AKIP		70.75*	70.75*	73	96.92%

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas tersebut, terdapat perbandingan capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2025 yaitu 70.75 (BB) walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun telah melebihi target. Hal ini dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pendampingan/coaching clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Dampaknya pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan AKIP yaitu adanya

perbaikan dokumen pendukung AKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LKj Triwulan IV Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah ditindaklanjuti oleh OPD, diantarnya yaitu :

- a. Reviu Dokumen Renstra
- b. Perbaikan Renja sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017
- c. Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi defenisi operasional
- d. Perbaikan Dokumen LKj sesuai sistematika Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
- e. Perbaikan Dokumen IKU dengan defenisi operasional dan formulasi

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 27

**Perbandingan Nilai SAKIP
DPMD Prov. Sulawesi Selatan dengan DPMD Kab. Luwu Timur
Triwulan IV Tahun 2025**

Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur	Selisih	Presentase Capaian AKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Prov. Sulawesi Selatan
73.20*	71.75*	1	103

Berdasarkan pada tabel diatas **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan **nilai 73.20 (BB)** dengan capaian 103% dari target 73. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

terdapat selisih nilai sebesar 1. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai AKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran**, yaitu :
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulan lingkup bidang
 - Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rill cost
 - Koordinasi yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- ✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik namun belum maksimal
 - Evaluasi kinerja hanya bersifat administratif dan tidak menjadi dasar perbaikan
 - Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum optimal
 - Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
 - Adanya Inpres No.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran
- ✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

 - Memaksimal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
 - Penetapan *person in charge* untuk setiap indikator sasaran

- Terkait regulasi penetapan punishment and reward agar dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan untuk dijadikan sebagai payung hukum
- Melakukan efisiensi anggaran bagi kegiatan yang tidak yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- ✓ **Efisiensi Anggaran**
 - a) Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya WIFI difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten Luwu Timur
- ✓ **Efisiensi Sumber Daya**
 - a) Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
 - b) Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN
- ✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 28
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
		Target Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	72	71.75*	99.65%	4.550.667.024	4.281.174.754	84.69%	

Tabel 29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II 1	Indikator Kinerja 2	% Capaian Kinerja 3	% Penyerapan Anggaran 4	% Tingkat Efisiensi Biaya 5
				Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	99.65%	46.56%	15.31%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 99.65% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91.60%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 8.40%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{4.281.174.754}{4.550.667.024} \times 100\% \\
 &= 100\% - 84.69\% \\
 &= \mathbf{15.31\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✓ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : **jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

Target 100 % dan realisasi 75 % dengan capaian kinerja 75 %, dan menyerap anggaran sebesar 35.91%,-. Capaian kinerja program kurang dari target karena beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.

✓ **Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung**

Tabel 30
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggaran dengan baik	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org	17 org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Lap	18 Lap	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat	Tersedianya administrasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi	100%	100%	100%

	Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah			
a.	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Tersedianya laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Lap	12 Lap	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Org	11 org	68.75%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	100%
f.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Lap	100%
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Lap	48 Lap	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk kepentingan dinas	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	1 unit	1 unit	100%
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk kebutuhan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100%
d.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa	Persentase Rata-Rata Capaian	100%	100%	100%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah	Kinerja Jasa			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap	3 Lap	100%
b.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	11 unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 unit	1 unit	100%

Dokumen Kegiatan Penunjang SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno-Hatta Malli 92981

Website: <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email: dpmd@luwutimurkab.go.id

Malli, 01 Desember 2025

Nomor : 700.1.2.76/En/DPMD
Lembaran : Undangan

Yth. 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kasubag
4. Para Pejabat Fungsional
5. Para Sopir OPMD
Masing-masing
di Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini di undang bapak/ibu para Pelaksana Program dan Kegiatan untuk hadir pada :

Har/Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025
Pukul : 08.00 - Selesai
Tempat : Aula Kantor DPMD

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DINAS.

AWALUDDIN ANWAR, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19810402 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Purwak Indah Malli
MALLI, 92981

Kegiatan : Evaluasi Enrgi Rencayuk Perbeda

Hari : Selasa, 02 Desember 2025

Tanggal : 08.00 - Selesai

Waktu : 08.00 - 10.00

Tempat : Aula Kantor OPMD

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANGGAL TANGAN

1				1
2				2
3				3
4				4
5	Lukman Sardjono	Ketid. Sdm	Malli	
6				6
7	Fitriana Lembil	Kepala	Malli	7
8	Fitriyah	Kepala	Malli	8
9	Purnomo Mulyadi	Kepala	Malli	9
10	Purnomo	Kepala	Malli	10
11	Nurul Hikmati Akbari	Kepala	Malli	11
12				12
13				13
14	Umarus	Kepala	Malli	14
15	Maulida, S.M.	Kepala	Malli	15
16	Akbar	Kepala	Malli	16
17	Widya Ria Siregar	Kepala	Malli	17
18	Nurul Hikmati A	Kepala	Malli	18
19	Fitriana Siregar	Kepala	Malli	19
20	Fitriana	Kepala	Malli	20
21	Uta Hafizah J	Kepala	Malli	21
22	Hamidah	Kepala	Malli	22
23				23
24				24
25				25
26				26

Dokumen Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan III TA. 2025



Dokumen Pengadaan Kendaraan Dinas



Pengadaan AC 1 unit



Pengadaan Alat Semprot Rumput 1 Unit



Pengadaan Laptop 3 unit



Pengadaan Scanner 1 Unit



Pengadaan Lemari arsip 1 unit



Pengadaan Komputer PC 1 Unit

8. KESIMPULAN

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran ‘Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 100% dipoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Target Kinerja

100

$$= \frac{100}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

72

$$= \frac{100}{72} \times 100\%$$

139%

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu **Rp. 4.550.667.024,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.281.174.754,-** atau **84.69%**.

1.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran Perubahan APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 5.855.206.239,-** (*Lima Miliar Delapan Ratur Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp. 2.510.247.964,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.251.815.515,-**, belanja modal peralatan dan mesin **Rp. 704.462.960,-**. Dan belanja modal gedung dan bangunan **Rp. 388.679.800,-**

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 4 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31
Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	BELANJA	5.855.206.239	2.835.631.293	48.43
1	BELANJA OPERASI	4.762.063.479	2.630.262.506	55.23
	Belanja Pegawai	2.510.247.964	1.239.676.112	49.38
	Belanja Barang dan Jasa	2.251.815.515	1.390.586.394	61.75
2	BELANJA MODAL	1.093.142.760	164.267.787	15.03
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.462.960	0.00	0.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	388.679.800	0.00	0.00
Total		5.855.206.239	2.835.631.293	48.43

Tabel 32
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2025	
		(Rp.)		(Rp.)	%
1	2	4	5	6	7
					8=7/6*100
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,699,071,009	4,550,667,024	4,281,174,754	84.69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,934,550	65,247,300	55,259,610	84.69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,299,700	23,476,550	21,476,563	91.48
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,522,450	2,594,650	1,797,011	69.26
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,653,750	3,176,400	2,881,338	90.71
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,458,650	35,999,700	29,104,698	80.85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,661,511,184	2,552,720,964	2,456,619,371	96.24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,602,681,184	2,510,247,964	2,415,884,609	96.24
	Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58,830,000	42,473,000	40,734,762	95.91
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	34,897,000	32,511,000	30,613,599	93.20
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	34,897,000	32,511,000	30,613,599	94.16
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122,981,075	103,940,700	31,316,639	30.13

	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,999,875	8,617,500	6,722,239	78.01
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	107,981,200	95,323,200	24,594,400	25.80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407,768,200	318,799,800	314,124,357	98.53
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,540,000	2,540,000	2,368,200	93.24
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	2,070,000	1,770,000	1,375,290	77.70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,404,200	11,954,200	11,602,800	97.06
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	7,015,000	6,895,000	6,370,828	92.40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,100,000	14,100,000	13,975,000	99.11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,640,000	29,320,000	29,212,000	99.63
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349,999,000	252,220,600	249,220,239	98.81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,000,000	799,063,960	772,072,800	96.62
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	592,562,960	573,960,000	96.86
	Pengadaan Mebel	-	4,000,000	3,996,000	99.90
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,000,000	107,900,000	104,275,900	96.64
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	94,601,000	89,840,900	94.97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,069,000	132,354,000	121,933,877	92.13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,845,000	3,930,000	3,450,502	87.80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	94,224,000	71,424,000	65,733,375	92.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,000,000	57,000,000	52,750,000	92.54

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,910,000	546,029,300	499,234,501	91.43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,650,000	160,120,500	144,806,881	90.44
	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	25,260,000	14,830,000	9,705,000	65.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	51,000,000	371,078,800	344,722,620	92.90
02	Program Penataan Desa	46,544,500	36,541,050	17,483,310	47.85
	Penyelenggaraan Penataan Desa	46,544,500	36,541,050	17,483,310	47.85
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	46,544,500	36,541,050	17,483,310	47.85
03	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,197,611,100	505,238,175	307,187,897	60.80
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,197,611,100	505,238,175	307,187,897	60.80
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10,654,200	31,099,500	21,345,445	68.64
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	456,484,550	238,964,250	115,124,883	48.18
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34,267,450	30,670,610	28,617,512	93.31
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	68,205,750	82,098,225	59,785,828	72.82
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	23,734,900	8,024,410	2,494,592	31.09
	Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3,419,890,500	-	-	#DIV/0!
	Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	44,080,600	55,392,580	35,479,282	64.05

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	101,299,650	24,513,850	10,825,322	44.16
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	38,993,500	34,474,750	33,515,033	97.22
04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,042,666,590	762,759,990	663,854,722	87.03
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,042,666,590	762,759,990	663,854,722	87.03
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	167,009,500	147,570,500	147,103,120	99.68
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	107,607,850	59,504,650	57,072,720	95.91
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	80,746,690	59,799,540	20,935,385	35.01
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687,302,550	495,885,300	438,743,497	88.48
TOTAL BELANJA		8,985,893,199	5,855,206,239	5,269,700,683	90.00

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

Tabel 33
Permasalahan dan Solusi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1	2	3	4	5
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 , dengan capaian kinerja 100%. Triwulan III target 1 dokumen yaitu Renstra2025-2029 dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp. 1.999.987,- yaitu anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 68.881,- , belanja Bahan kertas dan cover sebesar Rp 138.552,- , belanja bahan cetak sebesar Rp 535.224,- belanja bahan komputer sebesar Rp 45.330,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja makan minum rapat sebesar Rp 1.212.000,- kegiatan ini mengikut pada kegiatan rapat yang lain dikarenakan padatnya kegiatan sehingga sulitnya mengumpulkan pegawai . Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 21.476.563,- atau 91.48% .	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Target triwulan III adalah 2 dokumen yaitu RKAP-SKPD Tahun 2025 dan RKA-SKPD TA. 2026, dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 797.639,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 56.793,-, belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 30.992,-, belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 99.092,-, belanja bahan komputer sebesar Rp. 30.220,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog dan Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 600.000,- kegiatan ini mengikuti pada kegiatan rapat yang lain dikarenakan padatnya kegiatan sehingga sulitnya mengumpulkan pegawai. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 1.797.011,- atau 69.26%	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target sebanyak 2 dokumen. Dan terealisasi 100% yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan DPPA-SKPD TA. 2025 dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 295.062,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp.56.793,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 30.992,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 195.567,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 11.710,- ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog . Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 2.881.338,- atau 90.71%	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen yaitu tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2025, Laporan Evaluasi RKPD TW 4 TA. 2024 dan Laporan RKPD TW I, II, & III TA. 2025 dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 6.895.002,- dengan rincian yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 48.467,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 94.611,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 406.740,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 30.220,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 4.236.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 2.079000,- Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja makanan minuman dikarenakan padatnya kegiatan sehingga rapat diikutkan pada kegiatan lain dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait Perencanaan yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 29.104.698,- atau 80.85 %	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 17 orang dan terealisasi 17 orang, sehingga capaian kinerja 100 %.	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 94.363.355,- yang terdiri dari aress gaji 2,5% yang sifatnya dipersiapkan, pengembalian belanja TPP untuk ketidakdisiplinan ASN, dan adanya mutasi ASN dibulan november untuk 1 orang sehingga gaji desember dan TPP bulan November dan Desember untuk 1 orang ASN yang dimutasi tersebut tidak digunakan. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 2.415.884.609 atau 96.24%	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan IV sebanyak 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan an 3 dokumen, Laporan Bulanan Bendahara 12 dokumen dan Laporan semeseter I dokumen. dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.738.238,- yaitu belanja barang pakai habis (ATK,Kertas dan Bahan Komputer sebesar Rp 1.435.238 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 303.000,- yang merupakan kelebihan dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal terkait pengelolaan keuangan yang akan dikoordinasikan ke luar daerah dalam propinsi .Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 40.734.762,- atau 95.91%	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.897.401,- yaitu (1). Belanja barang pakai habis (ATK,Kertas, Bahan cetak dan Bahan Komputer sebesar Rp 749.401 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). (2). Honor pengurus barang sebesar Rp. 1.100.000 karena adanya penurunan honor pada bulan Nov-Des dari 950.000/bulan menjadi 400.000/Bulan. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp.30.613.599- atau 94.16%.	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

	Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sebanyak 12 dokumen. Pada triwulan I ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2025, Penyusunan E-Lapkin 2025, Penyusunan Kontrak UJ 2025 dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 1.895.261,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp.52.620,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 94.482,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 195.159,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.553.000,- ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog . Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 6.722.239,- atau 78.01%	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan yaitu 16 orang dan terealisasi 11 orang dengan capaian 68,75%. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta	Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 70.728.800 atau 74.20%, yaitu anggaran belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp. 21.500.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 49.228.800,- Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jadwal Bimtek yang direncanakan menggunakan anggaran BKPSDM sebagai pelaksana kegiatan dan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kegiatan Bimbingan Teknik di tahun berikutnya
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 2 paket dan terealisasi 2 paket yaitu paket belanja alat listrik dan belanja baterai dengan capaian kinerja 100%. penyediaan komponen instalasi listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.171.800 yang merupakan selisih harga Belanja komponen instalasi listrik dari DPA dengan harga Penawaran.	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 1 paket setiap triwulan yaitu alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan terealisasi sebanyak 1 paket dengan persentase capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.394.710 yang merupakan sisa nego belanja bahan komputer oleh pejabat pengadaan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 paket setiap triwulan, dan terealisasi 3 paket dengan persentase capaian kinerja100%. Penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.351.400 yang merupakan selisih harga Belanja alat dan bahan kebersihan kantor dari DPA dengan harga Penawaran.	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket setiap triwulan, dan terealisasi sebanyak 2 paket yaitu cetak spanduk dan Fotocopy, dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.524.172 yang merupakan sisa nego belanja bahan cetak oleh pejabat pengadaan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dan target triwulan II sebanyak 3 dok. untuk triwulan II target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen yaitu koran lokal 1 dokumen, koran nasional 1 dokumen, koran regional 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.125.000 yang merupakan tagihan belanja koran yang sampai akhir bulan desember tidak datang tagihannya sehingga tidak terbayarkan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu. Dengan target sebanyak 3 laporan dan terealisasi 3 laporan dengan capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.108.000 yang merupakan sisa nego belanja makanan dan minuman jamuan tamu oleh pejabat pengadaan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan. Dengan target sebesar 196 laporan dan terealisasi 196 laporan, capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa Anggaran untuk belanja jasa tenaga sopir bulan september sebesar Rp. 3.000.000,- dikarenakan sopir pada DPMD lulus PPPK tahap 2 bulan Oktober 2025	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan dengan target triwulan IV sebanyak 1 unit dan terealisasi 1 unit yaitu Mobil Innova Zenix 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) , dengan capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.18.602.960 yang merupakan sisa nego belanja kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit oleh pejabat pengadaan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan. Target 1 unit dan terealisasi 1 unit yaitu Lemari arsip. Capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.000 yang merupakan sisa nego belanja lemari arsip sebanyak 1 unit oleh pejabat pengadaan	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan. Target 11 unit dan terealisasi 11 unit yaitu Mesin Babat 1 unit, Alat Semprot Rumput 1 Unit, AC 1 Unit, Komputer PC 1 Unit , Laptop 3 unit , Printer 3 unit dan Scanner 1 Unit. Capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.624.100 yang merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan untuk : (1) belanja alat kebersihan (mesin babat) sebesar Rp. 2.170.500. (2) belanja alat pendingin Rp. 6.000, (3) belanja modal personal komputer sebesar Rp. 16.500 dan belanja modal peralatan personal komputer sebesar Rp. 1.431.100	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi 1 unit yaitu Pengadaan Tugu Nama Kantor DPMD. Capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.760.100 yang merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan untuk belanja modal pengadaan tugu nama kantor.	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan target sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan mapun yang diterima	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 479.498,- yaitu Belanja barang pakai habis (ATK,Kertas, dan Bahan Komputer yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). Realisasi keuangan sampai TW IV Rp.3.450.502- atau 87.80%.	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan, dan target sebanyak 12 rekening dan terealisasi 12 rekening yang terdiri dari 6 rekening air dan 6 rekening listrik Persentase capaian kinerja 100%.	tersisa anggaran tagihan Listrik sebesar Rp. 3.144.625, dan anggaran tagihan air sebesar Rp. 2.546.000 yang sifatnya dipersiapkan untuk pembayaran air dan listrik pada kantor DPMD dan kantor PKK	PPTK lebih mencermati sisa belanja e-catalog
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 4 orang Pada triwulan IV. Dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebanyak 3 org yaitu, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.250.000 yang belum terealisasi dengan rincian yaitu belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 2.500.000, belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 1.750.000,- yang merupakan gaji tenaga kebersihan dan tenaga keamanan untuk bulan Oktober karena lulus PPPK tahap II dan baru ada penggantinya dibulan November. Realisasi keuangan Rp. 52.750.000,- atau 92.54%	Agar PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 16 unit, dan terealisasi 16 unit. Persentase capaian kinerja 100%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp. 160.120.500,- dan Realisasi sebesar Rp. 144.806.881,- atau sebesar 90.44%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan yaitu 16 unit kendaraan dinas terdiri dari 4 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua.	PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 42 unit. dan terealisasi 42 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp. 14.830.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 9.705.000,- atau 65.44%. Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan kantor yang membutuhkan perbaikan/pemeliharaan antara lain : pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 42 unit yang terdiri dari 13 unit AC, 11 unit personal komputer, 15 unit peralatan personal komputer, LCD 2 unit dan TV sebanyak 1 unit	PPTK tetap mengidentifikasi kondisi peralatan kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit yaitu pemeliharaan kantor DPMD dan perbaikan pada kantor PKK. Dengan capaian kinerja 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp. 371.078.800 dan Realisasi sebesar Rp. 344.722.620 atau 92.90% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.356.180,- Disediakan anggaran untuk pemeliharaan 3 unit gedung yaitu kantor DPMD, Gedung kantor PKK, dan gedung kantin PKK.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor DPMD, Gedung kantor PKK, dan gedung kantin PKK. Serta menganggarkan untuk pemeliharaan Mushollah pada Kantor DPMD di tahun berikutnya
02	Program Penataan Desa			
9	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa			
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Indikator out put sub kegiatan adalah Persentase desa yang fasilitasi rencana pemekaran desa target pada Tahun 2025 yaitu 1 (satu) Desa. Untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa adupun kendala yang dihadapi adalah Moratorium pemekaran desa belum dicabut Kemendagri sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Target adalah 1 desa dan terealisasi 0 unit, sehingga capaian 0.00%. (sorowako, jalajja, puncak indah, tampinna, lampenai, wawondula)/desa per	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.057.740,- belum terealisasi, anggaran ini disiapkan untuk melakukan koordinasi ke Bina Pemdes Kemendari terkait dengan Pembentukan Desa sebesar Rp. 13.562.934,- dan makan minum rapat pembentukan desa sebesar Rp. 5.392.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran
03	Program Administrasi Pemerintahan Desa			

10	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator out put sub kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah 2 dokumen. Target sampai untuk triwulan II 1 (satu) dokumen dan realisasi 1 (satu) dokumen. Capaian tW II 100% yaitu kegiatan Silaturhami Bupati Luwu Timur dengan Perangkat Desa se- Kabupaten Luwu Timur dan target triwulan III 1 realisasi 1 dokumen, yaitu kegiatan Pengukuhan Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Capaian kinerja 100%	Anggaran yang tersisa sifatnya disiapkan untuk makan minum Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 5 (lima) dokumen. Kegiatan ini memuat Pelaksanaan proses penyusunan produk hukum desa dimulai dari penyusunan rancangan produk hukum hingga penetapannya. Target 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen yaitu : 1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa. 2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pembangunan Desa Unggul Jura. 3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. 4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian Dan Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. 5) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 235/D-02/VII/Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa . Capaian kinerja 100%	Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 123.839.367,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- disiapkan untuk belanja jasa tenaga ahli penyusunan Naskah Akademik untuk Ranperda Desa dan Ranperda Pilkades dan Rp. 16.619.152,- disiapkan untuk perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembahasan 2 Ranperda selebihnya dipersiapkan untuk anggaran belanja ATK, fotocopy dan bahan cetak	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah 125 dokumen. target pada triwulan III adalah 125 dokumen, dan realisasi 125 dokumen capaian kinerja 100.00%	Kegiatan telah terlaksana anggaran sebesar Rp. 2.053.098,- adalah sisa anggaran dari kegiatan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Indikator output sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 125 dokumen dan terealisasi 125 dokumen. Kegiatan sub ini merupakan asistensi APBDes yang pelaksanaannya akan dilakukan pada APBDes Perubahan 2025 dan APBDes Pokok 2026 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKK dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di desa dan dilaksanakan oleh beberapa OPD terkait yang berhubungan kegiatan yang diusulkan oleh desa. Capaian kinerja 100%	terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 22.312.397,- (belanja Makan Minum) yang tidak terealisasi hal ini disebabkan kegiatan Asistensi APBDes Pokok 2026 tidak dapat dilaksanakan karena PMK tentang rincian Dana Desa terbit di akhir Desember 2025	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Indikator output sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, namun LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD sehingga kegiatan sub ini dilaksanakan pada triwulan III. target pada triwulan III adalah 125 dokumen, dan realisasi 125 dokumen capaian kinerja 100.00%	Terdapat sisa anggaran Rp. 5.529.818,- yang diperuntukkan belanja Perjalanan dinas untuk dalam rangka pendampingan Penyusunan dalam LPPD namun metode ini diubah pendampingan penyusunan LPPD dirangkaikan review RPJMDes yang dilakukan di DPMD	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pilkades Tahun 2025 ditunda pelaksanaannya dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut diatur perubahan atau perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, dengan begitu Kepala Desa yang semula jabatannya 6 tahun ditambah menjadi 8 tahun	Dtelah dilakukan perubahan pada APBD Perubahan 2025	PPTK agar mengganggarka n kegiatan Pilkades pada tahun 2026
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Indikator output sub kegiatan adalah jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 15 Desa dan terealisasi 15 desa, sehingga capaian kinerja 100%.	Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 19.913.298,- dengan rincian Rp. 12.960.000,- yang disiapkan untuk perjalanan dinas dalam rangka seleksi perangkat desa dan Rp. 6.000.000,- untuk belanja Tenaga Administrasi (upah jasa) yang telah berubah status menjadi PPPK	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 11 dokumen. Target triwulan III sebanyak 0 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0.00%. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan profil desa dan lomba desa tahun 2025.	Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 13.688.528,- anggaran ini disiapkan untuk makan minum rapat dan jamuan tamu panitia lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Indikator output sub kegiatan adalah Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan pemerintah belum terlalisasi / dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan pimpinan.Target 124 dokumen dan Realisasi 124 dokumen sehingga capaian kinerja 100%	Terdapat sisa anggaran kas sampai triwulan IV sebesar Rp. 959.717,- atau 2.78 % dengan rincian yaitu anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 63.000,- , belanja Bahan kertas dan cover sebesar Rp.68.387,- , belanja bahan cetak sebesar Rp 540.000,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 120.330,- , belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 160.000,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 8.000,- Hal ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 33.515.033,- atau 97.22%	-

04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
11	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posy andu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Dengan target 254 dokumen, dan terealisasi 254 dokumen sehingga Capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp. 467.380,- yaitu anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 117.967,- , belanja Bahan kertas dan cover sebesar Rp.69.200,- , belanja bahan cetak sebesar Rp 127.883,- belanja bahan komputer sebesar Rp 120.330,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 32.000,- Hal ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 147.103.120,- atau 99.68% .	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. dengan target adalah 2 dokumen. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan. Target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen, dengan capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp. 2.431.930 atau 4.09%,- yang terdiri dari anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 53.454,- , belanja Bahan kertas dan cover sebesar Rp.522.836,- , belanja bahan komputer sebesar Rp 127.490,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.321.800,- Hal ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog dan belanja bahan cetak sebesar Rp 1.358.350,- Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 57.072.720,- atau 95.91% .	Agar PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran

	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indikator output sub kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 1 kelompok. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun sampai triwulan 4 belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 kelompok dengan capaian kinerja 0,00%.	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan TW 4 sebesar Rp. 38.864.155,- yaitu anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 137.382,-, belanja Bahan kertas dan cover sebesar Rp.85.873,-, belanja bahan cetak sebesar Rp.599.900,- Hal ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 38.041.000,- anggaran perdin ini direncanakan pada kegiatan TTG Tingkat Nasional di Celegon, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tertunda. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 20.935.385,- atau 35.01% .	Agar PPTK mencermati sisa anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Target 4 dokumen dan terealisasi 3 dokumen Capaian kinerja 100 %.	Disediakan anggaran kegiatan TW IV sebesar Rp. 495.885.300,- dan realisasi 438.743.497 atau 88.48%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.57.141.803 atau 11.52% yang terdiri dari belanja bahan bakar dan pelumas Rp.6.055.903, belanja bahan cetak Rp. 2.489.211,- belanja makanan dan minuman rapat Rp. 12.256.000,- , belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp.6.520.000,- Belanja makanan dan minuman aktif Lapangan Rp. 2.240.000,- belanja honorarium narasumber atau Pembahas, moderator, Pembawa acara, dan Panitia Rp. 10.000.000, belanja sewa alat studio lainnya Rp.2.000.000,- Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Rp. 4.000.000,- Belanja Hotel Rp. 5.200.000,- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 4.000.000,- belum terealisasi karena belum ada petunjuk dari Provinsi terkait kegiatan HKG dan Jambore PKK Tingkat Provinsi. Belanja Jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja Rp. 1.500.000,- .	Agar PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMD Tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

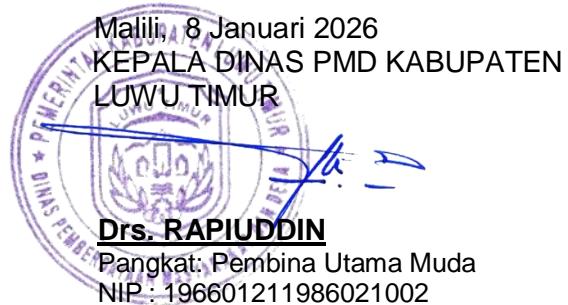
1. Realisasi anggaran belanja APBD Perubahan triwulan IV tahun 2025 sebesar **Rp. 2.835.631.293,-** atau **48.43%** yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.239.676.112,-** atau **49.38%**
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 1.390.586.394,-** atau **61.75%**
 - c. Belanja Modal sebesar **Rp. 164.267.787,-** atau **15.03%**
2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator Presentase Status Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **101.33%** dengan predikat **BAIK** , dengan target tahun 2025 adalah 30,00% dan **realisasi sebesar 30.40% atau 1 desa meningkat status mandiri** yaitu **Desa Arolipu Kecamatan Wotu**. Sehingga sampai dengan triwulan IV Desa Mandiri sebanyak 38 Desa.
3. Persentase Capaian Kinerja Sasaran II sebagai sasaran pendukung yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 sebesar

98.68% dengan predikat **BAIK** dengan Nilai AKIP yang diperoleh yaitu 71.05%* (BB)

4. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang belum optimal
 - b. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan
 - c. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025
5. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. Agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang ditingkat bidang
 - c. Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 - d. Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun
 - e. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait Indeks Desa

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur,

sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan pembangunan.



LAMPIRAN 1**Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Triwulan IV Tahun 2024****Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja (LKj)
Triwulan IV Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1.	Melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, berikan definisi operasional dan CSF. Pada rencana aksi tetapkan kinerja yang tertuang didalam perjanjian kinerja secara periodik pertiwulan. Selaraskan indikator kinerja pada PK dengan SKP dengan Rencana Aksi	Telah dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, Definisi operasional dan CSF telah dilakukan pada dokumen perjanjian kinerja pada eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada rencana aksi telah tetapkan kinerja yang tertuang didalam perjanjian kinerja secara periodik pertiwulan. Dan telah Selaraskan indikator kinerja pada PK dengan SKP dengan Rencana Aksi.
2.	Melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan didalam pengukuran capaian kinerja. Lakukan perbaikan rencana aksi sehingga laporan berjengang dapat memuat semua informasi sesuai kinerja yang ditetapkan. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk pemberian reward dan punishment, serta untuk melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penggunaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melibatkan pimpinan dalam pengambil Keputusan didalam pengukuran capaian kinerja - Dalam pemberian reward dan punishment, untuk saat ini masih berdasarkan presensi
3.	Mendasari Permenpan 53 tahun 2014 dalam penyusunan laporan kinerja, lengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan standar nasional, lengkapi dengan analisis yang memadai. Pimpinan harus memberikan perhatian kepada informasi yang termuat di dalam Laporan Kinerja agar dapat mengambil langkah-langkah untuk	Dalam penyusunan laporan kinerja kedepannya telah mempedomani Permenpan Nomor 53 tahun 2014.

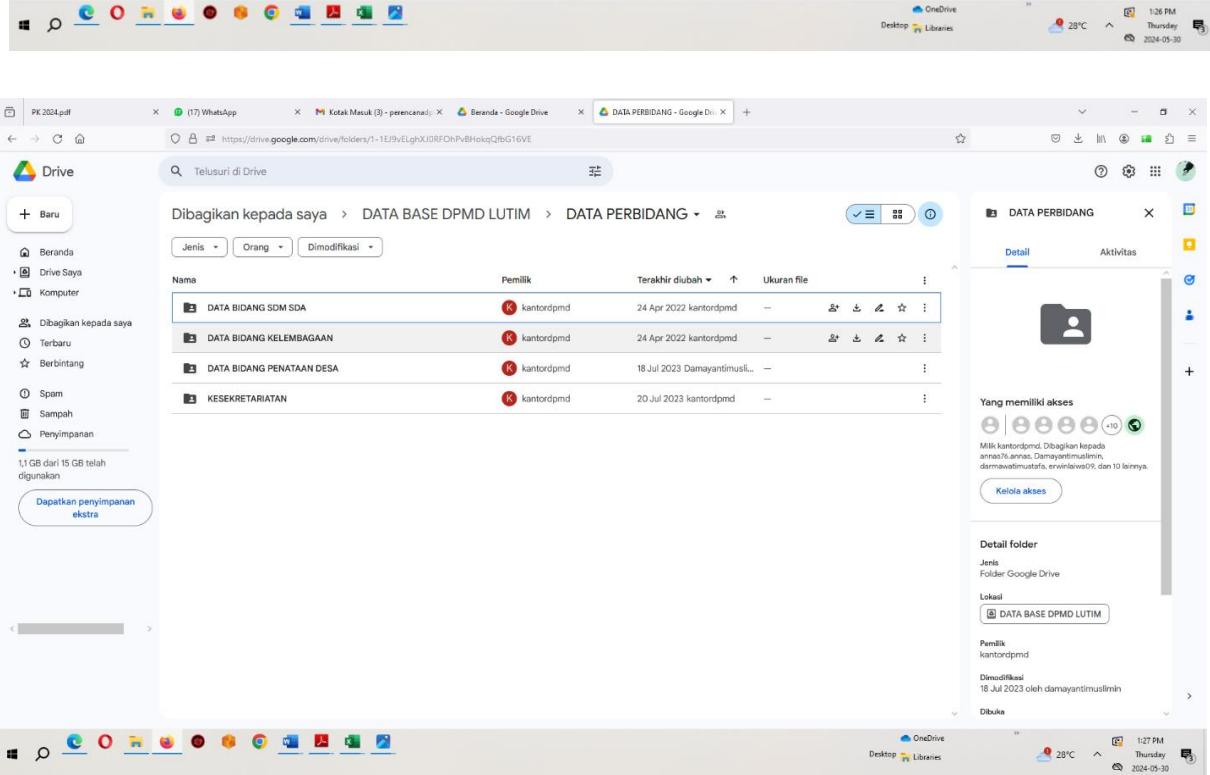
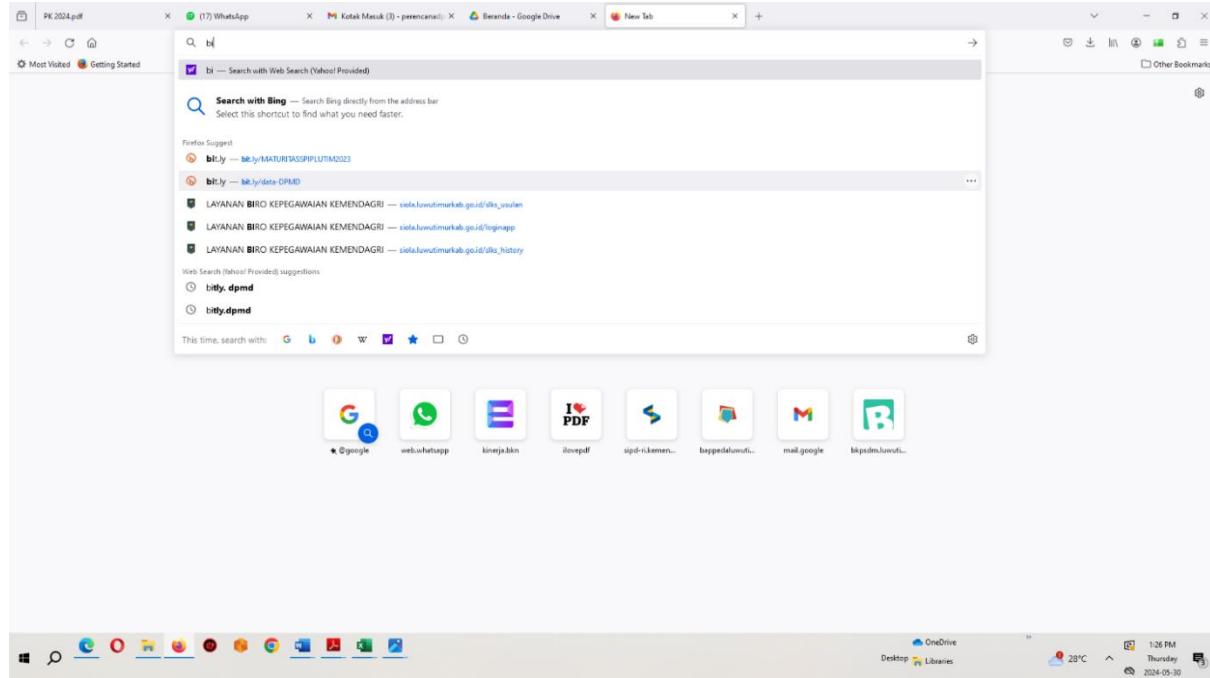
NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
	meningkatkan kinerja kedepannya melalui penyesuaian kebijakan, strategi, akyivitas dan penggunaan anggaran.	
5.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi internal.- Dokumentasikan setiap langkah-langkah evaluasi internal yang dilakukan.- Jika memungkinkan gunakan aplikasi agar pelaksanaan evaluasi internal dapat berjalan maksimal dan efisien.	<ul style="list-style-type: none">- Telah menginstruksikan perbaikan pelaksanaan evaluasi internal dari sekretaris dinas, para kabid, kasubag dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa- Dokumentasikan setiap langkah-langkah evaluasi internal Telah ditindaklanjuti. (terlampir)- Untuk saat ini pelaksanaan evaluasi internal melalui bit.ly/data-DPMD , namun jika memungkinkan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan direncanakan pengusulan anggaran pembuatan aplikasi pelaksanaan evaluasi internal tahun depan.



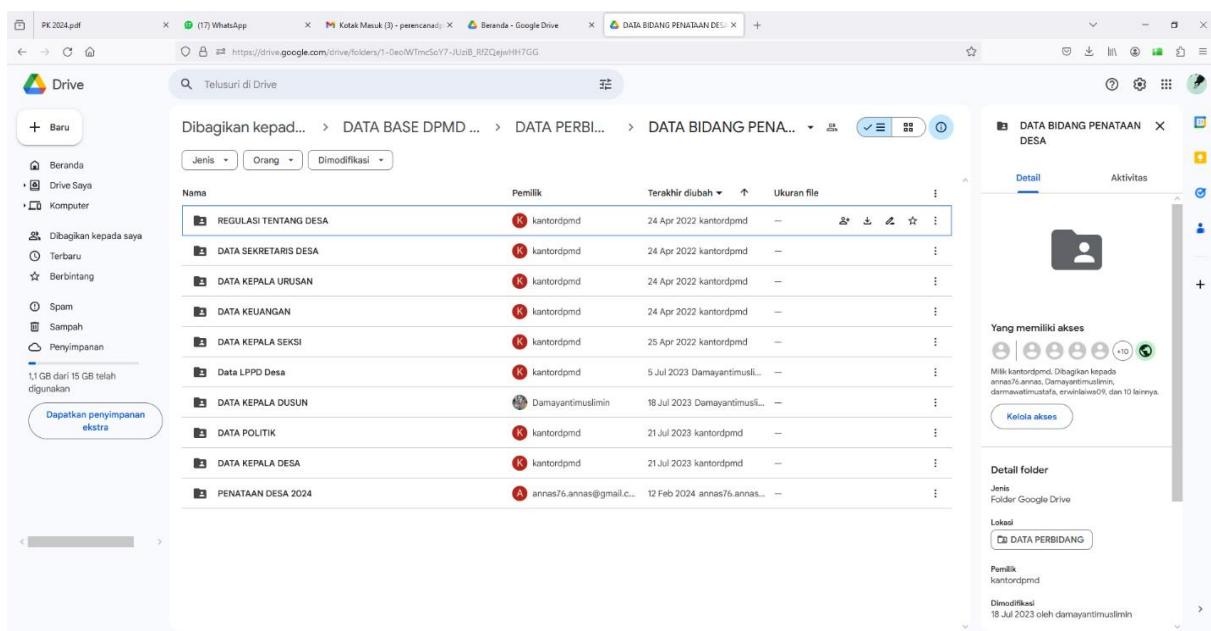
Lampiran Dokumentasi Tindak Lanjut LHE

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

<https://bit.ly/data-DPMD>



Laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025



Google Drive - DATA BIDANG PENATAAN DESA

Dibagikan kepad... > DATA BASE DPMD ... > DATA PERBI... > DATA BIDANG PENA...

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
REGULASI TENTANG DESA	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA SEKRETARIS DESA	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA KEPALA URUSAN	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA KEUANGAN	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA KEPALA SEKSI	kantordpmd	25 Apr 2022	—
Data LPPD Desa	kantordpmd	5 Jul 2023	Damayantimuslim...
DATA KEPALA DUSUN	Damayantimuslim	18 Jul 2023	Damayantimuslim...
DATA POLITIK	kantordpmd	21 Jul 2023	—
DATA KEPALA DESA	kantordpmd	21 Jul 2023	—
PENATAAN DESA 2024	annes76.annas@gmail...	12 Feb 2024	annes76.annas...

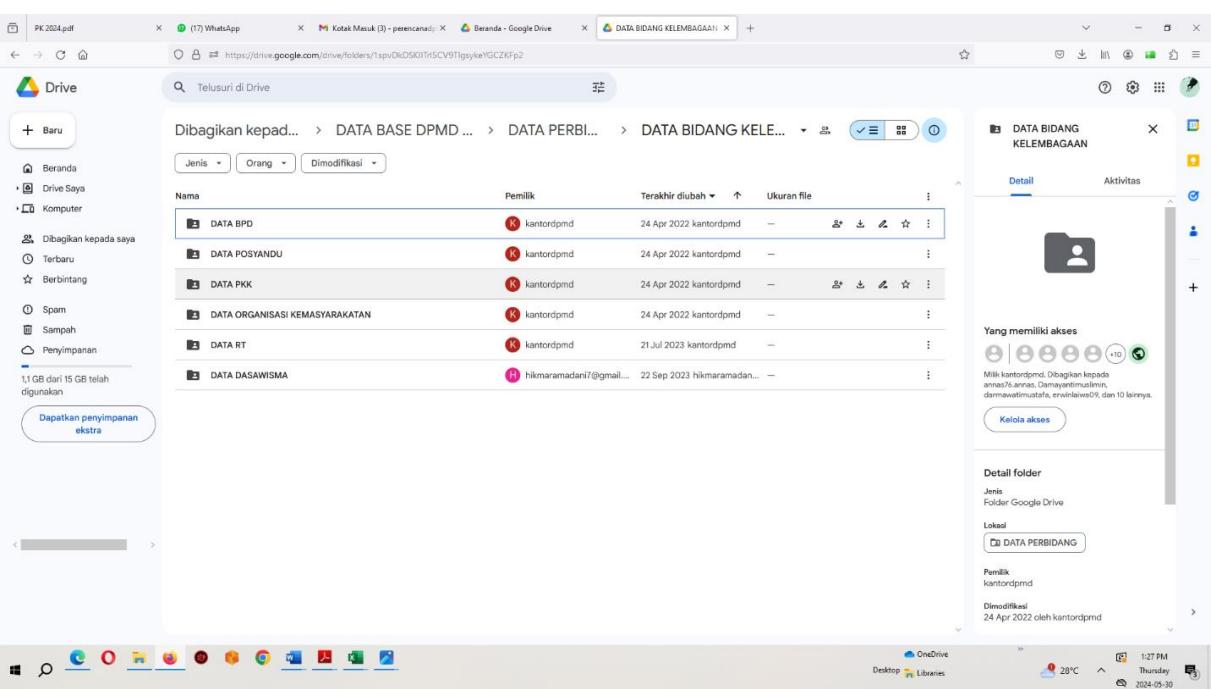
Yang memiliki akses

Detail folder

Lokasi

Detail folder

Lokasi



Google Drive - DATA BIDANG KELEMBAGAAN

Dibagikan kepad... > DATA BASE DPMD ... > DATA PERBI... > DATA BIDANG KELE...

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
DATA BPD	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA POSYANDU	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA PKK	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA RT	kantordpmd	21 Jul 2023	—
DATA DASAWISMA	hikmaramadan17@gmail...	22 Sep 2023	hikmaramadan...

Yang memiliki akses

Detail folder

Lokasi

Detail folder

Lokasi

Laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025

The screenshot shows a Google Drive interface with the following details:

Left Sidebar:

- Baru
- Beranda
- Drive Saya
- Komputer
- Dibagikan kepada saya
- Terbaru
- Berbintang
- Spam
- Sampah
- Penyimpanan
- 1.1 GB dari 15 GB telah digunakan
- Dapatkan penyimpanan ekstra

Central Area:

Telusuri di Drive

Jenis: Orang, Dimodifikasi

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
DATA BUMDES	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA BUMDESMA	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA BKAD	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA KAWASAN PERDESAAN	kantordpmd	24 Apr 2022	—
DATA DESTINASI WISATA	kantordpmd	21 Jul 2023	—
DATA P2MP	kantordpmd	24 Jul 2023	—

Right Sidebar:

Detail DATA BIDANG SDM SDA

Yang memiliki akses

Muhammad kantordpmd, Dibagikan kepada annas, Darmayanthiulimin, darmawatimustafa, envinleiva09, dan 10 lainnya.

Kelola akses

Detail folder

Jenis: Folder Google Drive

Lokasi: DATA PERBIDANG

Pemilik: kantordpmd

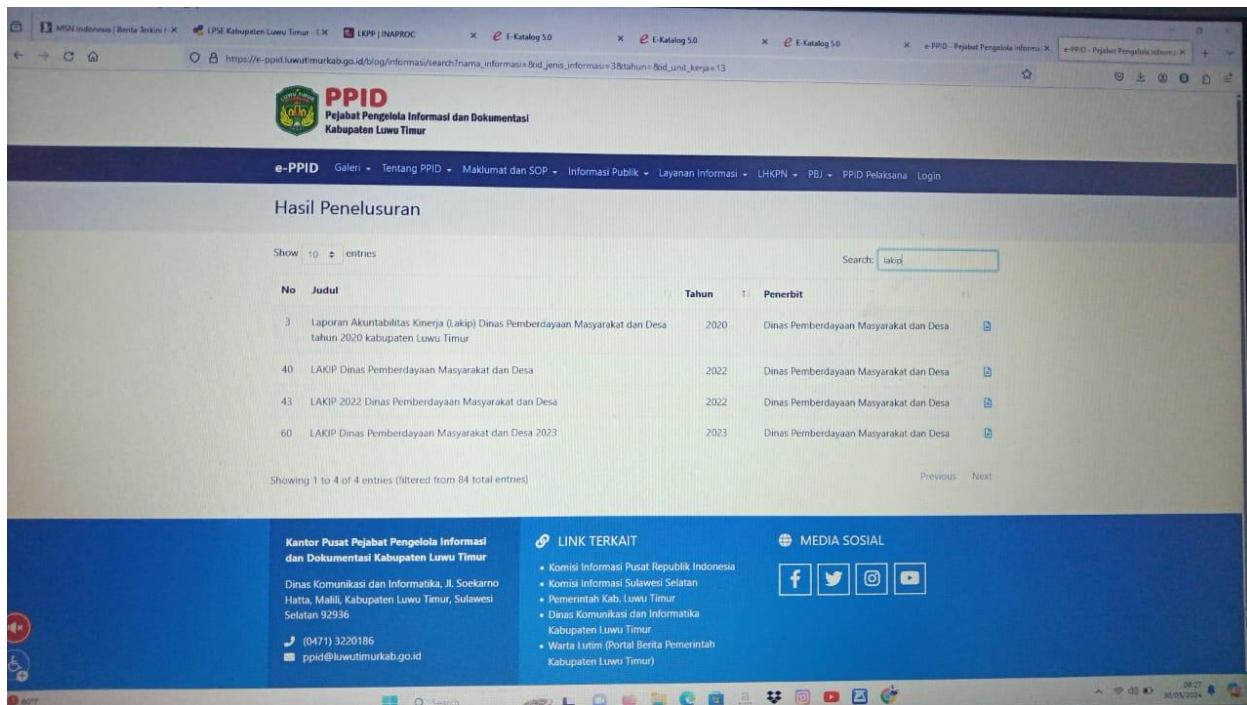
Dimodifikasi: 24 Apr 2022 oleh kantordpmd

Dibuka

Onedrive Desktop Libraries 1:28 PM 28°C Thursday 2024-05-30

Laporan kinerja Triwulan VII Tahun 2025

Publikasi Dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur Melalui web dpmu@luwutimurkab.go.id



The screenshot shows a search results page for 'lakip' on the e-PPID website. The results are as follows:

No	Judul	Tahun	Penerbit
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 kabupaten Luwu Timur	2020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40	LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
43	LAKIP 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
60	LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

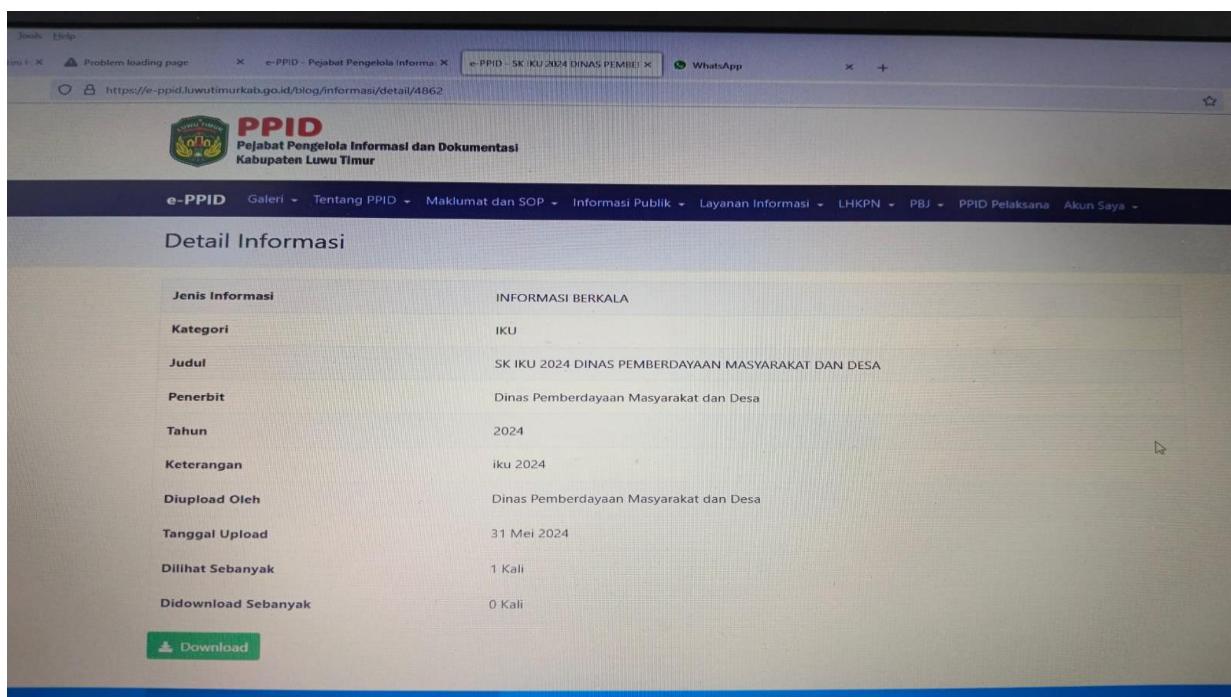
Showing 1 to 4 of 4 entries (filtered from 84 total entries)

LINK TERKAIT

- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Komisi Informasi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
- Warta Luwu (Portal Berita Pemerintah Kabupaten Luwu Timur)

MEDIA SOSIAL

Facebook Twitter Instagram YouTube



The screenshot shows the detail page for a document titled 'SK IKU 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA'. The document details are:

Jenis Informasi	INFORMASI BERKALA
Kategori	IKU
Judul	SK IKU 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penerbit	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun	2024
Keterangan	iku 2024
Diupload Oleh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal Upload	31 Mei 2024
Dilihat Sebanyak	1 Kali
Didownload Sebanyak	0 Kali

Download

